

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, di negara maju pun kemiskinan masih mewabah. Oleh sebab itu kemiskinan disebut sebagai problematika kemanusiaan yang dari dulu hingga sekarang masih menjadi perbincangan dan perdebatan di belahan dunia manapun. Tahun demi tahun banyak kalangan baik itu pemerintah, pengajar, aktivis, dosen, mahasiswa, maupun masyarakat umum menyoroti masalah tersebut. Telah banyak permasalahan kemiskinan yang ditelusuri oleh berbagai kalangan guna memahami, mengkaji, dan memecahkan permasalahan ini. Ide-ide untuk mencari jalan keluar guna memecahkan masalah kemiskinanpun telah banyak tertuang baik dalam bentuk program pengentasan kemiskinan, artikel-artikel ilmiah, dan tulisan dipelbagai media elektronik dan media cetak.

Menurut Levitan dalam Suyanto (2013:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Terdapat dua tipe kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Secara teoritis kemiskinan struktural yaitu keadaan miskin yang dialami oleh masyarakat dan bersumber dari struktur sosial (Suyanto, 2013:9). Kemiskinan kultural lebih kepada budaya, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti malas dan lemahnya etos kerja.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2015 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen). Jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk miskin pada September 2014, maka selama enam bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,86 juta orang. Apabila dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 0,31 juta orang (bps.go.id).

Berbagai program pun telah dirancang oleh para pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia dari rezim ke rezim program pengentasan kemiskinan juga sudah diberikan seperti pemberian bantuan dana IDT (Inpres Desa Tertinggal), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Pemberian Rumah Miskin untuk RTM (Rumah Tangga Miskin), KUR (Kredit Usaha Rakyat), penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi program bantuan kemiskinan yang ditujukan untuk keluarga miskin guna menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Program-program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di Indonesia dan salah satunya di Provinsi Sumatera Barat, hal ini dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Barat, pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin berjumlah 442.085 kepala keluarga (KK) atau 9,04 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat. Pada tahun 2012 menjadi 404.736 KK atau 8,19 persen, sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi 407.470 KK atau 8,14 persen. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin tinggal 354.738 KK atau 6,8 persen. Dinas Sosial Sumatera Barat terus berupaya menurunkan angka tersebut. Pada tahun 2015 Dinsos Sumatera Barat menargetkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menjadi 6% (Haluan, 2015). Data ini menunjukkan bahwa di Sumatera Barat masih terdapat ratusan ribu rumah tangga miskin.

Percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan melalui penguatan lembaga

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) baik Provinsi maupun daerah kabupaten/kota (RPJM SUMBAR, 2010-2015). Terdapat berbagai program pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat seperti program bantuan kemiskinan yang bersifat jaringan pengaman sosial yaitu BLT/SLT, Raskin (Beras Miskin), Rumah Miskin, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Askes, BPJS Kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan yang bersifat penambahan modal usaha untuk RTM yakni program KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Tidak luput program PNPM Mandiri yang masuk pada tahun 2007 sebagai program pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Tidak disangkal bahwa program-program pengentasan kemiskinan tersebut telah banyak membawa perubahan dan manfaat bagi sebagian Rumah Tangga Miskindi Indonesia tidak terkecuali di Sumatera Barat. Namun tidak dapat dipungkiri pula di lapangan masih banyak ditemui permasalahan dan kasus tentang program kemiskinan ini. Program BLT misalnya, pada saat pelaksanaan awal di tahun 2005 banyak dijumpai permasalahan di lapangan yaitu adanya kesalahan penargetan atau kesalahan sasaran (*mistargetting*). Rumah tangga tidak miskin ada yang menjadi penerima BLT/SLT. Sebaliknya ada rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima bantuan. Masalah lain adalah keterbatasan waktu sehingga membuat pelaksanaan BLT/SLT terkesan dipaksakan (Negara, 2011).

Permasalahan berikutnya tampak pada hasil penelitian oleh Afrizal tentang Gagalnya Program Anti-Kemiskinan di Sumatera Barat. Menurut Afrizal et.al (2006:5) Program anti kemiskinan membawa manfaat dalam pelaksanaannya namun hasil penelitian menjelaskan bahwa ada bantuan-bantuan yang berhasil menolong penerima bantuan terlepas dari kemiskinannya dan ada pula bantuan yang berkelanjutan. Secara umum program-program yang ada tidak berhasil mengentaskan kemiskinan seperti program pengentasan kemiskinan dengan

sifat Jaringan Pengaman Sosial, Kartu Sehat, Program Pengembangan Keuangan Mikro, dan Bantuan Bergilir.

Hasil FGD mengkonfirmasi hal tersebut. BLT/SLT dan Raskin dikatakan sebagai bantuan-bantuan habis sesaat. BLT/SLT pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tidak membuat mereka dapat menyimpan karena adanya bantuan tersebut. Kartu sehat adalah program bantuan yang dinilai bermanfaat oleh masyarakat namun ada beberapa masyarakat sulit dalam mengakses puskesmas karena jaraknya yang jauh dari tempat tinggal. Program Pengembangan Keuangan Mikro gagal disebabkan oleh dana simpan-pinjam yang dikembangkan dengan membentuk kelompok simpan-pinjam tidak bertahan lama. Penyebab utamanya adalah kelompok simpan-pinjam yang telah dibentuk tersebut cepat bubar. Bantuan Bergilir gagal secara umum bantuan sapi tidak bergilir dalam kelompok. Hal ini disebabkan oleh, pada umumnya, sapi dijual oleh penerima pertama sebelum beranak, sehingga tidak ada yang dapat digulirkan kepada anggota yang belum mendapat (Afrizal et al, 2006:7-10).

Begitu juga yang terjadi di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2015 di Nagari Kumango, masih dapat ditemui RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tidak mendapatkan KPS (Kartu Pengendalian Sosial), Raskin dan bantuan Rumah Miskin. Artinya permasalahan tentang pemberian dan penerimaan program kemiskinan tidak hanya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya namun pada tahun ini pun masih bisa kita temui.

Mayoritas masyarakat Nagari Kumango bekerja di bidang pertanian. Lahan yang mereka garap merupakan milik kaum dan milik orang lain. Pola kepemilikan lahan tersebut yaitu setiap anggota keluarga *saparuik* mendapatkan jatah untuk dapat dimanfaatkan. Temuan awal yang dilihat peneliti sebagian anggota keluarga *saparuik* tadi ada yang tidak mendapatkan jatah

pertahunnya.

Data jumlah KK miskin selama 10 tahun terakhir adalah dari tahun 2006-2010 sebanyak 124 KK dan tahun 2011-2015 sebanyak 202 KK. Data awal ini menunjukkan selama 10 tahun terakhir jumlah KK miskin tidak berkurang. Jumlah KK di Nagari Kumango adalah 630 dan yang termasuk KK dengan kriteria miskin adalah 202 KK. Jorong Selatan adalah wilayah yang memiliki jumlah KK miskin terbanyak yaitu 131 KK. Sisanya Jorong Utara memiliki 71 KK miskin. Program bantuan kemiskinan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin di Nagari Kumango adalah Raskin, Rumah Miskin, KPS (Kartu Pengendalian Sosial), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Jumlah penerima bantuan Raskin dan KPS adalah sebanyak 202 rumah tangga miskin dan bantuan PKH diterima oleh 32 rumah tangga miskin. Melalui wawancara singkat dengan salah seorang rumah tangga miskin, program bantuan Raskin, KPS, dan PKH masih ada rumah tangga yang tidak dikatakan miskin namun menerima bantuan tersebut.

Data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Perumahan yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa sebanyak 79 RTM penerima bantuan perbaikan rumah dan pendirian rumah layak huni tahun 2013 di Nagari Kumango berhasil dijalankan namun ada beberapa kendala. Kendala yang dilihat oleh peneliti yaitu rumah tangga miskin kesulitan mencari lahan untuk pendirian bantuan Rumah Miskin, karena lahan masih berdasarkan kepemilikan keluarga *saparuik*. Peneliti berasumsi bahwa dengan adanya program bantuan tadi justru menjadi sulit bagi RTM untuk keluar dari jerat kemiskinan karena adanya kesulitan dalam hal akses.

Tidak hanya bantuan Rumah Miskin, bantuan Raskin pun juga menemui kendala yaitu masih adanya rumah tangga yang tidak masuk ke dalam kriteria miskin namun menerima bantuan tersebut. Data sekunder yang diperoleh peneliti, jumlah RTM di Nagari Kumango adalah

202 KK. Data juga didukung melalui hasil wawancara singkat dengan salah satu perangkat nagari bahwa dari 202 KK, keseluruhannya menerima bantuan Raskin. Namun di lapangan masih terlihat ada rumah tangga yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan Raskin. Begitu juga sebaliknya, ada rumah tangga tidak miskin namun menerima bantuan tersebut.

Ketersediaan sumber daya yaitu tanah yang luas dan adanya program bantuan kemiskinan lantas mengapa rumah tangga miskin masih belum bisa berangkat dari jerat kemiskinan. Bantuan kemiskinan yang seharusnya mendukung rumah tangga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan justru menjadi penghambat. Hal ini dikarenakan adanya sebagian kelompok yang masih termasuk kriteria RTM tidak memperoleh bantuan kemiskinan dan adanya kecenderungan perangkat nagari menggilirkan bantuan kemiskinan sehingga terkesan tidak merata.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah disampaikan di atas berikut dengan pelaksanaannya, menuai ketidakpuasan bagi rumah tangga miskin. Ada banyak program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Nagari Kumango namun masih ada beberapa kendala yang dialami rumah tangga dalam mengakses dan memanfaatkan program bantuan kemiskinan tersebut. Maka penting untuk mengetahui hambatan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini lebih berfokus pada hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah Nagari Kumango dan RTM untuk mengentaskan kemiskinan.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa, aktifis, dan lembaga sosial dalam upaya mengatasi permasalahan semacam itu. Pertama penelitian oleh Sri Rahmadani tahun 2014 tentang strategi petani miskin sawah dalam mengatasi kemiskinan, sebuah studi di Nagari Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa klasifikasi petani miskin berdasarkan sumber pendapatan, kepemilikan

aset produksi dan struktur kekerabatan. Dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi, para petani miskin sawah menentukan beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan terkait dengan ketersediaan sumber daya, aturan, dan kapabilitas petani yang mendukung strategi tersebut dijalankan.

Kedua penelitian oleh Yudha Pamungkas tahun 2014 tentang penentuan keluarga miskin berbasis masyarakat di Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya komplain dari masyarakat dalam penentuan kriteria Rumah Tangga Miskin oleh BPS, sehingga pemerintah menyerahkan kepada kelurahan untuk menentukan kriteria miskin masing-masing kelurahan. Kriteria miskin yang ditetapkan oleh tokoh formal dan informal yaitu aset, pendidikan anak, pendapatan dan pekerjaan, dan jumlah tanggungan anak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Penelitian ini berangkat dari pandangan adanya dua paradigma kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang datang dari luar individu atau kelompok dalam masyarakat. Penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku pada masyarakat itu. Kemiskinan jenis ini membelit masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka (golongan miskin) tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya (Suyanto, 2013:9-10). Berbeda dengan kemiskinan struktural, kemiskinan kultural justru datang dari dalam individu dan kelompok pada masyarakat. Kemalasan, ketidakberdayaan, lemahnya etos kerja, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terpelihara menyebabkan mereka miskin. Oleh sebab itu kebiasaan padadiri mereka sendiri yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki fokus untuk mendeskripsikan hambatan pengentasan kemiskinan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus kepada strategi yang dilakukan oleh petani dan penentuan kriteria keluarga miskin untuk mengatasi kemiskinan. Menarik diteliti tentang masalah kemiskinan untuk mengungkapkan bagaimana hambatan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena mencoba melihat dan menjelaskan akar permasalahan yang pada gilirannya akan bermanfaat sebagai sumber informasi untuk mengambil kebijakan dalam menentukan program pengentasan kemiskinan dan pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang masih terdapat RTM. Program bantuan kemiskinan memberikan dampak positif bagi Rumah Tangga Miskin di daerah ini tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua rumah tangga miskin dapat mengakses bantuan tersebut. Ketidakmampuan untuk mengakses akan menyebabkan rumah tangga miskin semakin sulit untuk berangkat dari lingkaran kemiskinan. Sebagian rumah tangga miskin tidak mendapatkan bantuan kemiskinan karena adanya ketidakmerataan dalam pemberian bantuan. Hal ini terlihat dengan adanya rumah tangga yang masih dikategorikan miskin namun tidak mendapatkan bantuan kemiskinan.

Peneliti melihat adanya hambatan ketika mengakses dan memanfaatkan program bantuan kemiskinan pada rumah tangga miskin di Nagari Kumango. Adanya bantuan kemiskinan idealnya memudahkan rumah tangga miskin dalam memanfaatkan dan mengakses. Namun berdasarkan observasi awal pada saat ini di Nagari Kumango sebagian rumah tangganya mengalami kesulitan dalam hal akses dan pemanfaatan bantuan kemiskinan serta sumber daya

yang ada. Berdasarkan fakta tersebut menarik untuk diteliti tentang permasalahan akses, pemanfaatan program bantuan kemiskinan dan sumber daya yang tersedia di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: ***“Bagaimana hambatan pengentasan kemiskinan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirinci atas tujuan umum dan tujuan khusus.

3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hambatan pengentasan kemiskinan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab.

3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

- 1) Mendeskripsikan hambatan struktural dalam pengentasan kemiskinan
- 2) Mendeskripsikan hambatan kultural dalam pengentasan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini.

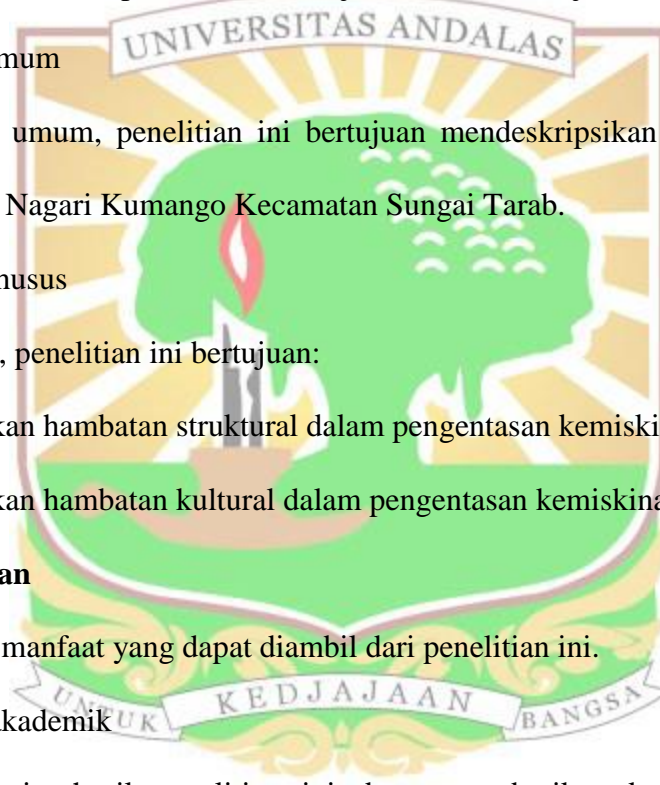
4.1. Manfaat akademik

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu sosial dalam masalah kemiskinan.

4.2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Nagari Kumango dalam menyusun kebijakan program pengentasan kemiskinan.

1.5 Tinjauan Pustaka



1.5.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar *miskin* berarti tidak berharta, serba kekurangan sedangkan *kemiskinan* adalah hal miskin, keadaan miskin, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Menurut Friedman kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara itu, yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi lima hal. Pertama, modal produktif atas aset misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013: 2-3).

Menurut Heru Purwandi, kemiskinan diartikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia seperti kebutuhan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang. Berbeda dengan konsep kemiskinan struktural yang diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang timbul sebagai akibat struktur sosial yang rumit yang menyebabkan masyarakat termarginalisasi dan sulit memperoleh akses terhadap berbagai peluang (Purwandari, 2011:27).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang di dalamnya terdapat suatu *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan yakni kemiskinan itu sendiri, ketidakberdayaan, isolasi, kerawanan, kelemahan fisik. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan

dibandingkan dengan faktor lainnya (Chambers, 1987: 145). Kemudian menurut Edi Suharto menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2009:16).

Penyebab terjadinya kemiskinan antara lain karena penduduk mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, pengaruh eksternal seperti lonjakan kenaikan harga BBM, tarif, dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (RPJMD SUMBAR 2010-2015: 67).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kemiskinan dari BPS karena adanya kriteria atau indikator penentuan RTM yang memudahkan peneliti mendeskripsikan kondisi kemiskinan nantinya. Kriteria atau indikator kemiskinan diantaranya

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 M² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal tersebut terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembikar tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan masak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam/ satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sekali atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan jumlah lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tinggi dari kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SMP.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

1.5.2 Kemiskinan Struktural

Struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkenaan dengan struktur. Struktural memusatkan perhatiannya pada struktur, tetapi tidak sama dengan struktur yang menjadi pokok perhatian para fungsionalis struktural. Kalau sebagian besar sosiolog fungsionalis struktural menitikberatkan analisisnya pada struktur sosial, maka yang menjadi pokok kaum strukturalis adalah struktur *linguistik* (Ritzer, 2010: 647). Struktur menurut Giddens tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan (Priyono, 2002:23).

Soejatmoko dalam Syahrizal menjelaskan kemiskinan struktural menyebutkan golongan miskin terpenjarakan oleh struktur-struktur sosial eksploitatif yang melanggengkan ketergantungan dan kelumpuhannya. Soejatmoko mencontohkan dua golongan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural yaitu buruh nelayan dan pengrajin di kota-kota kecil (Syahrizal, 2006: 16). Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam Suyanto, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur

sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Suyanto, 2013:9).

Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya terletak pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan (Suyanto, 2013: 11).

Berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai konsep tentang kemiskinan struktural yang hampir sama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep Selo Soemardjan. Kemiskinan struktural menurut peneliti adalah suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang tidak mendapatkan hal akses untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kemiskinan ini datang dari luar, artinya keadaan miskin bukan masyarakatlah yang mau tetapi keadaan miskin datang dari struktur kepemilikan tanah dan struktur sosial masyarakat. Menurut pengamatan dan asumsi awal peneliti, kemiskinan struktural pada rumah tangga miskin Nagari Kumango cenderung disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya seperti lahan dan program bantuan kemiskinan.

1.5.3 Kemiskinan Kultural

Kultural dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sesuatu yang berkenaan dengan kebudayaan. Konsep kemiskinan kultural dalam Jurnal *Agriekonomika 2*, merupakan kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat

kehidupannya. Akibat tingkat pendapatannya rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum, atau dengan kata lain miskin karena disebabkan oleh faktor budaya (Wijayanti-Ihsanudin, 2013).

Menurut Sunyoto Usman dalam Syahrizal (2006) perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga level analisis; individual, keluarga dan masyarakat. Pada level individual ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality* seperti sikap parochial, apatisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada level keluarga ditandai oleh jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union consensual marriage*. Kemudian pada level masyarakat terutama ditandai oleh tidak terintegrasi secara efektif dengan institusi-institusi masyarakat. Mereka seringkali dianggap sebagai objek yang perlu digarap dari pada sebagai subjek yang perlu diberi peluang berkembang. Sedangkan menurut Oscar Lewis memperlihatkan bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan kekurangan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan (Syahrizal, 2006: 16-17).

Peneliti menggunakan konsep kemiskinan kultural lebih kepada lemahnya etos kerja dan sulitnya untuk berusaha yang dimiliki oleh masyarakat. Banyaknya sumber daya yang tersedia untuk diolah tetapi masyarakat miskin tipe ini tetap bermalas-malasan dan tidak bergairah untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka sudah merasa cukup dengan kebutuhan dan keadaan hidup yang dijalani, dan tidak adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup agar keluar dari jerat kemiskinan.

1.5.4 Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan membawa rumah tangga miskin yang hidup di bawah standar hidup rata-rata, mengangkat harkat hidup ke arah standar hidup di atas rata-rata. Pengentasan kemiskinan dari dulu sejak pemerintahan Presiden

Soekarno hingga sekarang Presiden Joko Widodo telah ada dan membawa manfaat bagi rumah tangga miskin di Indonesia.

Diawali oleh Presiden Soekarno yang menuangkan program kemiskinan dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun; Presiden Soeharto dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos), dan lain-lain; Presiden Habibie dengan Jaringan Pengaman Sosial, Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan lain-lain; Presiden Abdurrahman Wahid dengan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), dan lain-lain; Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain (Markum, 2009: 2).

Program-program di atas merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk mengangkat dan membawa rumah tangga miskin yang hidup di bawah standar rata-rata ke arah hidup di atas rata-rata. Dampak positif telah banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia namun tidak dapat dipungkiri masih banyak rumah tangga miskin di pedesaan maupun perkotaan yang hidup dililit kemiskinan. Menurut Kartasmita dalam Suyanto pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan kepemilikan aset produksi terutama tanah dan modal (Suyanto, 2013: 15).

Terdapat berbagai cara untuk memberikan bantuan kemiskinan, misalnya dengan tujuan kepada rumah tangga miskin, kelompok atau masyarakat serta usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini akan melihat program pengentasan kemiskinan yang menysasar rumah tangga

miskin yaitu Rumah Miskin, Raskin, KPS (Kartu Pengendalian Sosial), dan PKH (Program Keluarga Harapan).

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Ilmu sosiologi memiliki tiga paradigma yang menjadi sudut pandang dan pemikiran dalam melihat fenomena sosial di masyarakat. Pertama; paradigma fakta sosial, secara garis besarnya fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial dan pranata sosial (*social institution*). Sifat dasar serta hubungan dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut paradigma fakta sosial (Ritzer, 2011:18). Kedua; paradigma definisi sosial, dimaksudkan dengan definisi sosial yaitu tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain (Ritzer, 2011:38). Ketiga; paradigma perilaku sosial, yaitu tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku (Ritzer, 2011:72).

Pada paradigma fakta sosial yang mengarah pada struktur sosial, individu selalu beranggapan bahwa norma-norma itu adalah *di luar* kesadaran individu. Perhatian penganut paradigma ini terpaut kepada antarhubungan antara struktur sosial, pranata sosial dan hubungan antara individu dengan struktur sosial serta antarhubungan antara individu dengan pranata sosial. (Ritzer, 2011:20). Berbeda dengan paradigma fakta sosial, selanjutnya paradigma definisi sosial memaparkan tindakan individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep fakta sosial (Ritzer, 2011:43).

Menurut tokoh sosiologi modern, Berger dan Luckmann, individu menciptakan masyarakat, dan masyarakat pada gilirannya menciptakan individu (Johnson,1986:68). Pada intinya merujuk dari pemikiran kedua tokoh ini bahwa masyarakat dan pranata sosial tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Berbeda paradigma maka berbedalah pandangan tentang masyarakat dan struktur serta institusi. Melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat modern saat ini, peneliti merujuk ahli sosiologi Anthony Giddens. Menurutnya manusia selalu mempunyai ide tentang dunia sosial, tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya, dan tentang kondisi kehidupannya. Melalui idenya itu manusia masuk ke dalam dunia sambil mempunyai niat untuk mempengaruhi dan mengubahnya (Wirawan, 2012:292).

Giddens kemudian melahirkan teori strukturasi yang mana ada dua tema sentral yang menjadi poros pemikirannya, yaitu hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*), serta sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*). Struktur adalah “aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial”. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses dimana “struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial (Priyono-Herry, 2002:18-19).

Sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang (*timeless and speceless*) serta maya (*virtual*), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Berbeda dengan pengertian Durkhemian tentang struktur yang lebih bersifat mengekang (*constraining*), struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat memberdayakan (*enabling*): memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah Giddens melihat struktur sebagai sarana (*medium* dan *resources*) (Priyono,2002: 23).

Penelitian yang berjudul Hambatan PengentasanKemiskinan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Peneliti menggunakan teori strukturasi oleh

Anthony Giddens untuk menelaah permasalahan penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Peneliti menggunakan teori strukturasi karena masalah penelitian yang telah dikemukakan pada latar belakang dianggap mampu dijelaskan melalui teori strukturasi.

Agen dalam teori strukturasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Adanya sifat manusia yakni kebebasan berfikir, bertindak dan memiliki ilmu pengetahuan maka disini agen juga memiliki kemampuan berfikir dan melihat keadaan dalam rentang ruang dan waktu.

Masalah kemiskinan pada penelitian ini berada dalam hambatan pengentasan kemiskinan. Struktur dalam gagasan Giddens dapat bersifat memberdayakan (*enabling*): memungkinkan terjadinya praktik sosial. Sifat yang kedua dari struktur adalah mengekang (*constraining*) (Priyono-Herry, 2002: 23).

Struktur disini adalah sumber daya dan aturan. Sumber daya baik itu lahan ataupun program pengentasan kemiskinan, sedangkan aturan adalah kesepakatan atau norma-norma yang telah ada di Nagari Kumango.

Terdapat hubungan antara agen dan struktur (*duality*) dalam penelitian ini yakni sulitnya agen (RTM) untuk mengakses program bantuan kemiskinan dan pola penggunaan lahan karena adanya aturan dalam pemberian bantuan kemiskinan dan aturan dalam hak akses atas lahan. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur sehingga dalam proses sosialnya melahirkan struktur sosial dan sekaligus menjadi sarana praktik sosial.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Sri Rahmadani, mahasiswa sosiologi program pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2014. Judul penelitiannya adalah *Strategi Petani Miskin dalam Mengatasi*

Kemiskinan (Studi di Nagari Batupuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini menjelaskan beragam strategi dan pemahaman rasionalitas yang diterapkan petani miskin sawah dalam mengatasi kemiskinan.

Temuan dilapangan menjelaskan bahwa adanya potret kemiskinan yang tersebar di semua jorong. Adanya beberapa klasifikasi petani miskin berdasarkan sumber pendapatan, kepemilikan aset produksi, dan struktur kekerabatan yang menunjukkan bahwa petani miskin di jorong tersebut tidak memiliki lahan. Kemudian para petani miskin sawah menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan yakni strategi sumber mata pencaharian ganda, mengubah sumber pendapatan, menjaga hubungan baik dengan pemilik sawah agar tetap mempertahankan aset.

Penelitian selanjutnya oleh Yudha Pamungkas, mahasiswa sosiologi program sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2014 dengan judul penelitian *Penentuan Keluarga Miskin Berbasis Masyarakat* (Studi di Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya komplain dari masyarakat terkait dengan kriteria penentuan KK miskin oleh BPS. Pemerintah menyerahkan kepada kelurahan-kelurahan untuk menentukan kriteria masing-masing KK miskin. Kelurahan Kampung jua memiliki kriteria yang telah ditetapkan melalui musyawarah dengan tokoh formal dan informal diantaranya asset, pendidikan anak, pendapatan dan pekerjaan, dan jumlah tanggungan anak.

Penelitian ini berbeda dengan peneltian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian oleh Sri lebih fokus kepada pilihan strategi yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan. Bagaimana rasionalitas si petani miskin sawah yang hidup dalam suatu masyarakat dan menggunakan pilihan strategi tadi untuk

mengatasi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha lebih terfokus bagaimana cara menentukan kriteria KK miskin. Dalam proses penentuannya melibatkan tokoh formal dan informal yang mengedepankan proses musyawarah.

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada hambatan dalam pengentasan kemiskinan. Melihat pada tataran struktural dan kultural yang menjadi penghambat rumah tangga miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Menurut peneliti belum ada penelitian tentang masalah kemiskinan yang mengkaji bagaimana struktur yang idealnya mendukung justru bisa menghambat masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data yang kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afriзал, 2014:13). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena memungkinkan peneliti untuk dapat memahami dan menganalisis fenomena dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana hambatan pengentasan kemiskinan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab. Peneliti mengambil data kualitatif yang merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Miles, 1992:1). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini bahwa peneliti dapat menggali secara

mendalam dan memahami data serta sumber informasi sehingga dengan pendekatan kualitatif data dapat dijabarkan dengan jelas melalui kata-kata walaupun peneliti menggunakan angka untuk membantu memperjelas data dalam penelitian.

Melalui data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Akhirnya, seperti yang telah dikemukakan oleh Smith, penemuan-penemuan dari penelitian kualitatif itu mempunyai mutu “yang tak dapat disangkal” (Miles, 1992:2). Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan dapat menjelaskan tujuan dari penelitian.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014:11).

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, karena dengan tipe penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana realita sosial yang terjadi di lapangan. Melihat dan mendengarkan apa saja yang terjadi terkait dengan penelitian ini, kemudian mencatat secara terperinci dan menjelaskannya dengan kata-kata atau penjabaran lengkap dan data berupa angka untuk mendukung data dalam penelitian. Penelitian tipe deskriptif mampu menjabarkan data dan fakta dengan objektif bagaimana hambatan pengentasan kemiskinan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Mereka tidak dipahami sebagai objek, sebagai orang yang memberikan respon terhadap suatu (hal-hal yang berada di luar diri mereka), melainkan sebagai subjek. Oleh sebab itulah dalam penelitian kualitatif orang yang diwawancarai tersebut juga disebut sebagai subjek penelitian (Afrizal, 2014:139). Informan penelitian adalah orang yang diharapkan mampu memberikan informasi dengan jelas dan dianggap paham dan benar-benar mengerti tentang informasi atau data dalam penelitian.

Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik mendapatkan informan dengan disengaja, artinya peneliti telah mengetahui dan menentukan kriteria orang yang dirasa mampu memberikan informasi seputar penelitian. Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti sebelumnya telah mengetahui informan mana saja yang akan ditemui. Peneliti telah mengetahui data dan tempat tinggal informan sehingga teknik ini disebut dengan mekanisme pemilihan informan dengan disengaja. Informan yang dipilih harus sesuai dengan capaian dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Informan dalam penelitian ini yaitu rumah tangga miskin dan tokoh masyarakat formal serta informal. Tokoh formal yaitu wali nagari dan perangkat nagari serta BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari) dalam hal ini lembaga pemerintahan resmi. Tokoh informal yaitu *niniak mamak*, alim ulama, *cadiak pandai* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta organisasi lainnya seperti Karang Taruna, Majelis Taklim dan Wirid Yassin. Informan di atas dikategorikan ke dalam informan pelaku yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang dirinya dan pikirannya terhadap masalah penelitian. Setelah diketahuinya tokoh-tokoh tadi

sebagai informan penelitian maka peneliti menentukan kriteria siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini.

Pada Penelitian ini jumlah informan yang peneliti tentukan berjumlah 12 orang yaitu 6 informan RTM dan 6 informan perangkat nagari dan tokoh masyarakat. Informan tersebut adalah informan yang termasuk dalam kriteria informan yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tinggal minimal lima tahun di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar (Informan Pelaku)
- 2) Perangkat nagari selaku tokoh formal yakni wali nagari, sekretaris nagari, bendahara, dan kaur nagari yang bekerja minimal tiga tahun di Nagari Kumango (Informan Pelaku)
- 3) Tokoh-tokoh masyarakat selaku tokoh informal yakni *niniak mamak*, alim ulama, *cadiakpandai*, dan ketua KAN yang telah bekerja minimal tiga tahun di Nagari Kumango (Informan Pengamat)

Peneliti juga menggunakan informan pengamat yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat selaku tokoh informal yaitu Ketua BPRN, Ketua KAN, Cadiak Pandai, dan RTM lainnya (tetangga). Informan ini dirasa paham dan dapat memberikan informasi seputar informan pelaku atau tentang suatu kejadian. Alasan menggunakan informan pengamat karena peneliti akan mencari data seluas-luasnya dan melakukan kroscek kembali agar data yang didapatkan menjadi data yang valid. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur (dalam Tahun)	Keterangan
1	Irpendi / Eva Warnis	34 / 29	RTM (Menurut BPS) Bantuan yang pernah diterima

			dalam 3 tahun terakhir: Raskin, KPS, Rumah Miskin
2	Pendi Chandra / Dewi	43 / 40	RTM (Menurut BPS) Bantuan yang pernah diterima dalam 3 tahun terakhir: Raskin, KPS
3	Yuliar	76	RTM (Menurut BPS) Tidak mendapatkan bantuan
4	Azwar / Fitra Yenti	47 / 40	RTM (Menurut BPS) Bantuan yang pernah diterima dalam 3 tahun terakhir: Raskin, KPS, Rumah Miskin
5	Maidasril / Nelfiza	60 / 50	RTM (Menurut BPS) Bantuan yang pernah diterima dalam 3 tahun terakhir: Raskin, KPS
6	Bapak G / Ibu Y	41 / 37	Non RTM tetapi mendapatkan bantuan Raskin
7	Mely Aniza	27	Kaur Kesra Nagari Kumango
8	Iis Zamora Putra S.Pd	29	Sekretaris Nagari Kumango
9	Yohanes Usman	67	Wali Nagari Kumango 2002- 2015
10	Alwis Bahmi S.Pd	55	Ketua BPRN
11	M. Aidil Dt. Gadang Majolelo	60	Ketua KAN

Sumber : Data Primer 2016

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bagian penting dalam penelitian. Data yang telah diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan dengan wawancara mendalam. Semua informasi yang diberikan informan melalui tuturan dan penjelasan merupakan bagian dari data primer. Adapun

dalam penelitian ini data yang diambil adalah hasil wawancara mendalam dengan informan tentang bagaimana Hambatan Pengentasan Kemiskinan di Nagari Kumango.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui literatur, dokumen-dokumen, surat-menyurat, artikel, bahan bacaan seperti skripsi, tesis dan disertasi, maupun internet sebagai bahan acuan serta tambahan guna mendukung data dalam penelitian. Data sekunder yang telah diperoleh peneliti yaitu Tambo Adat Nagari Kumango, Profil Nagari Kumango, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Kumango Tahun Anggaran 2014, Data Calon Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, Data Rumah Tidak Layak Huni Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013, Data Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Rumah Miskin Tahap II Kab. Tanah Datar, Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sumatera.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses *penyidikan*, mirip pekerjaan detektif yang meyakinkan dikemukakan oleh Dauglas (1976). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara mendalam, triangulasi dan studi dokumentasi.

1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan baik itu ke RTM maupun lahan pertanian yang dimiliki atau tempat RTM bekerja. Observasi dimaksudkan agar peneliti dapat melihat dan mengetahui keadaan di lapangan melalui panca indera, karena hasil wawancara saja tidak cukup untuk menjawab masalah

penelitian. Observasi ilmiah tidaklah sama dengan sekedar “melihat sesuatu” (Horton, 1984:5).

Observasi dilakukan sebelum mewawancarai informan, observasi ini juga dilakukan di lokasi tempat tinggal informan, tempat informan melakukan aktifitas seperti bekerja di sawah dan ladang. Waktu observasi dilakukan pada pagi dan siang hari, seperti pengamatan di sawah dan ladang karena informan bekerja dari pukul 07.00 – 16.00 WIB.

Adapun hal yang di observasi oleh peneliti yaitu aset yang dimiliki oleh RTM, mengamati informan RTM ketika bekerja di sawah dan ladang, mengamati proses penimbangan beras Raskin oleh perangkat nagari. Ketika melakukan observasi peneliti dibantu dengan menggunakan kamera digital.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini karena dengan wawancara mendalam, data yang diperoleh menjadi kaya dan banyak sehingga informasi lebih *detail*. Penelitian tentang Hambatan Pengentasan Kemiskinan di Nagari Kumango menurut peneliti membutuhkan wawancara mendalam karena dengan pertanyaan yang berulang-ulang informasi tentang bagaimana hambatan pengentasan kemiskinan dapat diperoleh.

Wawancara dilakukan pada informan dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam informan penelitian di atas. Wawancara dengan informan dengan kriteria wali nagari atau tokoh formal dilakukan di kantor tempat informan bekerja atau dengan mengunjungi rumahnya pada pagi atau siang hari. Wawancara dengan tokoh masyarakat

informal dan RTM dilakukan dengan mengunjungi rumahnya pada siang atau sore hari. Durasi waktu wawancara mendalam tidak ditentukan karena melihat kondisi atau kesediaan informan, dan wawancara dilakukan lebih dari satu kali sampai data sudah dirasa cukup dan telah tercapainya tujuan penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur artinya wawancara dilakukan dengan tidak menggunakan pertanyaan yang telah dirunut dengan pilihan jawaban yang tersedia melainkan dengan wawancara ke arah informal dan terbuka. Adapun alat yang digunakan ketika wawancara mendalam adalah *tape recoder* untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung agar dapat dikoreksi kembali setelah wawancara berakhir, kamera guna mendokumentasikan kegiatan wawancara mendalam, dan alat tulis serta daftar pedoman wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.

Pada penelitian ini informan yang diwawancarai adalah Wali Nagari bertempat di Kios pupuk miliknya. Sekretaris Nagari, Kaur Kesejahteraan Masyarakat yang diwawancarai di Kantor Wali Nagari Kumango. Rumah Tangga Miskin, Tokoh masyarakat (Ketua BPRN, Ketua KAN, Cadiak Pandai) yang diwawancarai di rumahnya. Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Disamping itu peneliti juga mewawancarai rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan kemiskinan dan rumah tangga miskin yang mendapatkan program bantuan kemiskinan agar dapat mengetahui bagaimana keadaan miskin mereka yang sesungguhnya.

Wawancara dengan informan dilakukan sebanyak dua kali dan kesulitan yang dihadapi peneliti yaitu terkendala dalam mencari informan rumah tangga yang tidak

seharusnya mendapatkan bantuan kemiskinan. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu berupa alat tulis, daftar pedoman wawancara, kamera dan alat perekam guna membantu proses wawancara.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya, dan mengkoscek kembali data yang telah diperoleh sebelumnya dari informan. Teknik ini dipilih karena data yang diperoleh dari informan pelaku dirasa tidak cukup, peneliti ingin memastikan kembali apakah benar informasi yang disampaikan oleh informan tersebut. Teknik ini terus dilakukan sampai data valid dan telah memenuhi tujuan dari penelitian. Informan yang dijadikan teknik triangulasi adalah tokoh informal dan tetangga atau orang sekitar tempat tinggal informan RTM. Waktu dilakukannya triangulasi disesuaikan dengan kesediaan informan. Dalam penelitian ini informan yang dijadikan triangulasi adalah Ketua BPRN, Ketua KAN, *Cadiak Pandai*, dan RTM lain selaku tetangga Informan rumah tangga miskin.

4) Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder baik itu berupa tulisan ilmiah, literatur, informasi dari media cetak maupun elektronik, buku dan bahan untuk mendukung peneliti dalam menganalisa dan menginterpretasikan data. Pengumpulan dokumen sudah dilakukan mulai dari pengajuan TOR (*Term of Reference*) hingga pembuatan proposal penelitian, dan penyusunan skripsi. Dokumen yang telah diperoleh diantaranya dari kantor Wali Nagari Kumango, buku-buku di Laboratorium Sosiologi dan perpustakaan Universitas Andalas, internet dan media *online*.

1.6.5 Unit Analisis

Penelitian ini memiliki unit analisis yang berguna untuk memfokuskan kajian peneliti dalam penelitian. Objek yang diteliti ditentukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian mengenai Hambatan Pengentasan Kemiskinan memiliki kriteria yaitu kelompok dalam hal ini Rumah Tangga Miskin yang ada di Nagari Kumango.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan pada peneliti lapangan untuk pulang balik antara memikirkan tentang data yang ada dan menyusun strategi guna mengumpulkan data. Model ideal bagi pengumpulan data dan analisis data adalah sebuah model yang jalin-menjalin diantara keduanya sejak awal. Kunjungan lapangan dilakukan secara berkala dan diselang-seling dengan saat diadakannya pengumpulan data serta penyajian data untuk penarikan kesimpulan (Miles, 1992:73-74).

Ada beberapa cara analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu cara analisis data menurut Miles dan Huberman, cara analisis data menurut Spradley dan analisis dengan cara mereduksi, dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan secara siklus dari tahap satu hingga tahap tiga kemudian kembali ke tahap satu (Afrizal, 2014:178).

Menurut Spradley analisis data dilakukan dengan domain dan taksonomi. Domain adalah sebuah kategori umum yang mencakup berbagai hal yang terperinci. Analisis taksonomi yaitu analisis lanjutan dari domain, mencari dan merumuskan rincian dari domain yang telah didapat. Peneliti dapat melakukan pengumpulan data berikut dan dapat pula menggunakan data yang telah terkumpul (Afrizal, 2014:181-182). Analisis data menurut Robert K. Yin adalah dilakukan dengan penjodohan pola. Penjodohan pola adalah peneliti mempertemukan atau mencocokkan

atau membandingkan ide atau gagasan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan literatur atau dengan kata lain membandingkan proposisi peneliti dengan empiris (Afirizal, 2014:183).

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis sesuai model Miles dan Huberman yaitu kodifikasi data dalam hal ini peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Penyajian data yaitu peneliti menyajikan semua temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Tahap yang direkomendasikan yaitu memperlihatkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu proses kategorisasi data atau dengan kata lain proses menemukan pola dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data (Miles, 1992 : 16).

Rekaman wawancara dengan *tape recorder* dituliskan ke dalam catatan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Tulisan-tulisan yang tersusun rapi dan biasanya disunting oleh peneliti lapangan agar menjadi akurat, sebelum siap untuk digunakan (Miles, 1992:75).

Setelah mengumpulkan data di lapangan dengan bantuan alat penelitian yaitu catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara dengan rumah tangga miskin, perangkat nagari dan tokoh masyarakat. Kemudian peneliti memberikan kategorisasi atau pengkodean terhadap data yang telah disusun dan ditulis ulang dengan rapi. Kemudian mereduksi bagian-bagian yang termasuk penting dan kurang penting.

Langkah berikutnya peneliti melakukan penyajian data, peneliti mulai menuliskan laporan penelitian dengan mengelompokkannya berdasarkan sub-sub judul yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan verifikasi dengan menarik kesimpulan. Melalui data yang telah diperoleh dengan mendapatkan sumber yang berbeda yakni triangulasi dengan rumah tangga miskin, Ketua BPRN, Ketua Kan, dan Cadiak

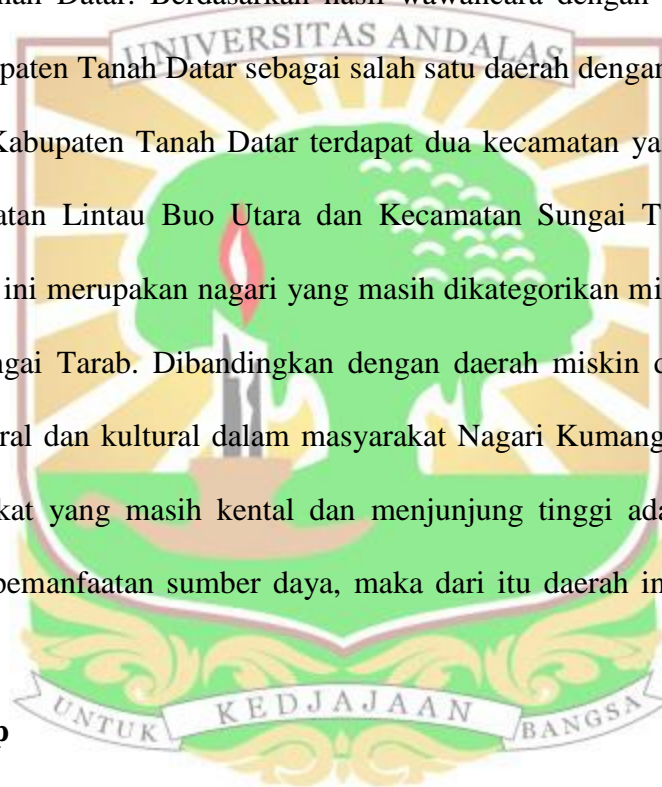
Pandai maka data yang telah dikelompokkan tadi dianalisis oleh peneliti. Analisis data dilakukan berulang-ulang selama penelitian maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan mulai dari awal perancangan penelitian sampai dengan penarikan kesimpulan. Berakhirnya analisis data ketika penelitian sudah berakhir atau selesai diteliti.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Daerah yang dijadikan lokasi penelitian adalah Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali Nagari Kumango, peneliti melihat Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah dengan penduduk termiskin di Sumatera Barat. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat dua kecamatan yang masih dikategorikan miskin yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Sungai Tarab. Nagari Kumango dipilih karena Nagari ini merupakan nagari yang masih dikategorikan miskin selain Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Dibandingkan dengan daerah miskin di atas, peneliti melihat adanya gejala struktural dan kultural dalam masyarakat Nagari Kumango. Adanya struktur dan kebudayaan masyarakat yang masih kental dan menjunjung tinggi adat istiadat serta adanya permasalahan akses pemanfaatan sumber daya, maka dari itu daerah ini dipilih sebagai lokasi penelitian.

1.6.8 Definisi Konsep

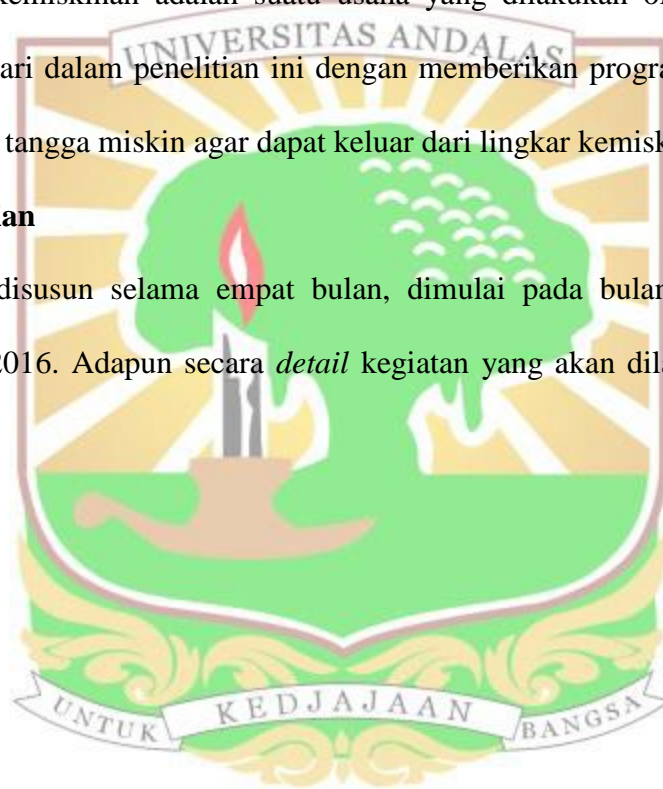
- 1) Kemiskinan adalah keadaan tidak mampu yang dialami oleh Rumah Tangga Miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik
- 2) Orang Miskin adalah individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan termasuk ke dalam kriteria oleh Badan Pusat Statistik



- 3) Hambatan struktural adalah halangan atau rintangan yang datang dari struktur sosial masyarakat yaitu halangan dalam hal akses pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan halangan dalam hal posisi atau kedudukan dalam masyarakat.
- 4) Hambatan kultural adalah halangan atau rintangan yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini dikarenakan lemahnya etos kerja atau nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat.
- 5) Pengentasan kemiskinan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat nagari dalam penelitian ini dengan memberikan program bantuan kemiskinan kepada rumah tangga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini disusun selama empat bulan, dimulai pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016. Adapun secara *detail* kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2016			
		Jan	Feb	Mar	Apr
1	Mengurus Izin Peneliti	■	■		
2	Membuat Pedoman Wawancara		■		
3	Penelitian Lapangan				
	- Mengunjungi Informan		■		
	- Wawancara Mendalam		■		
	- Observasi		■		
4	Analisis Data				
	- Kodifikasi Data			■	
	- Penyajian Data			■	
5	Penulisan Draf Skripsi			■	■
6	Bimbingan Skripsi			■	■
7	Rencana Ujian Skripsi			■	■

